

**SKRIPSI**

**STATUS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF SEBAGAI  
*COLLECTING SOCIETY* DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN  
PERBANDINGAN IMPLEMENTASINYA DI AMERIKA SERIKAT**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum*

Oleh :

**JUNABIKO ALTY**

**1510112070**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNATIONAL  
(PK VI)**



**JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2021**



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: JUNABIKO ALTY	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Lubukbasung/20 Juni 1996	f) Tanggal Lulus : 21 April 2021	
b) Nama Orang Tua : Alinusir, S. Pd	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,42	
d) Program Kekhususan : Hukum Internasional	i) Lama Studi : 5 Tahun 10 Bulan	
e) No. BP : 1510112070	j) Alamat : Jl. Bariant Indah No. 4A, Anduring	

**STATUS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF SEBAGAI *COLLECTING SOCIETY* DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN PERBANDINGAN IMPLEMENTASINYA DI AMERIKA SERIKAT**  
(Junabiko Alty, 1510112070, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 52 halaman, 2021)

**ABSTRAK**

Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berhak untuk mengelola hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta maupun Pemilik Hak Terkait dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti melalui suatu perjanjian pemberian kuasa. Pemerintah Indonesia membentuk sebuah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional untuk mewujudkan sebuah pelayanan satu pintu demi menyederhanakan proses pemungutan royalti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan status Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia dan praktek lembaga sejenis di Amerika Serikat. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini bersifat normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah ; (1) Konstruksi hukum dalam pembentukan lembaga ini dinilai kurang tepat, karena dianggap mengenyampingkan asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dari sebuah lembaga manajemen kolektif, terlihat dari terlalu banyak campur tangan negara dari awal pembentukan dan pengaturan wewenang lembaga manajemen kolektif. (2) Dibandingkan dengan praktek pemungutan royalti oleh lembaga sejenis di Amerika Serikat, pemerintah/negara tidak terlalu dominan dalam pembentukan lembaga manajemen kolektif, pemerintah berperan untuk memfasilitasi dan mengawasi agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata kunci: Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti, Kewenangan.**

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,	1.	2.
Tanda Tangan	Dr. Najmi, S.H., M.H	M. Jhon, S.H., M.H
Nama terang		

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional : Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: JUNABIKO ALTY	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Lubukbasung/20 Juni 1996	f) Tanggal Lulus : 21 April 2021	
b) Nama Orang Tua : Alinusir, S. Pd	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3, 42	
d) Program Kekhususan : Hukum Internasional	i) Lama Studi : 5 Tahun 10 Bulan	
e) No. BP : 1510112070	j) Alamat : Jl. Bariang Indah No. 4A, Anduring	

**STATUS OF LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF AS A COLLECTING SOCIETY IN INDONESIA REVIEWED FROM COPYRIGHTS LAW No. 28/2014 AND THE IMPLEMENTATION COMPARING TO THE UNITED STATES OF AMERICA**  
(Junabiko Alty, 1510112070 , Fakultas Of Law, Andalas University, 52 pages, 2021)

**ABSTRACT**

*Regarding to Indonesia Copyrights Law No. 28/2014 Article 1 No. 22, Collecting Society entitled to administrate the economic right of copyright holders, or related-right holders in the form of collecting and distributing royalty under the power of attorney agreement. Indonesia government set up a National Collective Management Organization to create a one-door integrated service in order to simplify royalty collecting process. This study aims to analyze and describe the status of collecting society in Indonesia and the implication of similar entity in the United States. Method of legal writing that I use in this study is normative method, which referred to a library research. Result of this study is : (1) Legal construction to establish this collecting society was inadequate, because of the government put aside the freedom of contract principle which is the basic principle of the collecting society, clearly demonstrated by how government put a lot of interference from the first of establishment and rules the authority of collecting society. (2) Compared to royalty collecting by the similar entity in the United States, government was not dominating for the formation of the collecting society, government's role is just to facilitates and supervises the parties for not doing activities against the law.*

**Kata kunci: Collecting Society, Royalty, Authority.**

abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda Tangan	1.		2.	
	Nama terang		M. Jhon, S.H., M.H	

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Internasional : Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:	
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:	